



Dampak Tingkat Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Makassar

The Impact of Unemployment Rate, Employment Opportunities, Minimum Wage, and Inflation on Poverty in Makassar City

Toto Mahendra^{1*}, Juardi²

^{1*,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail: totomahendra030@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensi, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan Negara sehingga pengentasan kemiskinan merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi serta berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengangguran, Kesempatan Kerja, Upah Minimum Regional dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data adalah data sekunder dari tahun 2008 hingga 2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Eviews versi 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka, Inflasi, dan kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Kebijakan peningkatan UMR dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Makassar. Pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang meningkatkan pendapatan langsung pekerja melalui upah yang lebih layak. Selain itu, diperlukan perhatian pada peningkatan kualitas pekerjaan dan perlindungan pekerja di sektor informal untuk memastikan bahwa kesempatan kerja yang ada benar-benar dapat mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Upaya ini harus disertai dengan pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Kata kunci; kemiskinan, pengangguran, kesempatan kerja, upah minimum, inflasi

ABSTRACT

Poverty is a complex and multidimensional issue that affects various aspects of society and the state. Consequently, poverty alleviation presents a complex challenge requiring an integrated and sustainable approach. The objective of this study is to determine the influence of unemployment, employment opportunities, regional minimum wage, and inflation on poverty in Makassar City. This research employs a quantitative approach, utilizing secondary data from 2008 to 2022. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the aid of Eviews version 12 software. The results indicate that the open unemployment rate, inflation, and employment opportunities do not have a significant effect on poverty. However, the regional minimum wage has a significant effect on poverty in Makassar City. The policy of increasing the regional minimum wage can be an effective tool in poverty alleviation efforts in Makassar City. The government needs to focus on policies that directly



increase workers' income through more adequate wages. Additionally, attention should be given to improving job quality and protecting workers in the informal sector to ensure that available employment opportunities can truly lift people out of poverty. These efforts should be accompanied by inflation control to maintain economic stability and the purchasing power of the population.

Keywords: *poverty, unemployment, employment opportunities, minimum wages, inflation*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu isu mendasar yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan terus menjadi problematika yang tidak kunjung selesai dalam diskursus sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah menyadari bahwa kegagalan dalam menangani kemiskinan dapat memicu berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan komprehensif untuk memastikan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas nasional.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Suwandi & Sabar, 2022). Diperlukan keterlibatan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanganan berbagai permasalahan sosial (Sabar et al., 2022)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan (Todaro, 2006; Andiny, & Mandasari, 2017). Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup (Alimuddin, 2018).

Kemiskinan di Kota Makassar tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pengentasan yang diemban oleh Pemerintah Kota Makassar. Meskipun angka kemiskinan di daerah ini masih berada di bawah rata-rata kemiskinan nasional, permasalahan ini tetap mendapat perhatian serius. Selama periode 2017-2022, angka kemiskinan di Kota Makassar cenderung berfluktuasi pada tingkat yang relatif stabil. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebanyak 68.190 ribu jiwa atau sekitar 4,59 persen dari total populasi, sementara pada akhir periode pengamatan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebanyak 71.830 ribu jiwa atau sekitar 4,58 persen dari total populasi. Meskipun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dalam periode tersebut, tingkat kemiskinan secara keseluruhan tetap relatif stabil.

Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti

makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan serta pendidikan yang diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang di kategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai) (Krisnawati, 2019). Kemiskinan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya penduduk yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan pada umumnya tidak memadai. Kota makassar sering dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk (Van, 2013).

Jumlah pengangguran di Kota Makassar mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran mencapai 10,59%, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 12,19% di tahun 2018. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran sedikit menurun menjadi 9,83%, namun kembali mengalami peningkatan yang cukup besar di tahun 2020, mencapai 15,92%. Kemudian, terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi 13,18%. Fluktuasi tingkat pengangguran di Kota Makassar setiap tahunnya menunjukkan pentingnya perhatian yang diberikan oleh Pemerintah terhadap isu ini. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, diperlukan adanya kesempatan kerja yang luas untuk masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam peningkatan produksi dan menghindari kemiskinan.

Data tentang kesempatan kerja di Kota Makassar juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2017, jumlah kesempatan kerja mencapai 548.368 jiwa, kemudian meningkat menjadi 589.221 jiwa pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019, jumlah kesempatan kerja kembali menurun menjadi 627.893 jiwa. Di tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 629.933 jiwa. Dengan demikian, perhatian terhadap peningkatan kesempatan kerja di Kota Makassar merupakan hal yang penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil bagi masyarakat.

Faktor lain dalam menentukan tingkat kemiskinan di suatu daerah adalah upah minimum. Gagasan upah minimum sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh agar terhindar dari kemiskinan (Sumarsono, 2003).

Dalam rentang tahun 2017 hingga 2021, Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Makassar cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, UMR di Kota Makassar sebesar Rp. 2.504.500, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 3.191.572 pada tahun 2021. Peningkatan signifikan ini menandakan kondisi pembangunan yang kondusif di Kota Makassar, khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Dengan demikian, pertumbuhan positif UMR di Kota Makassar menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi para

pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) di Kota Makassar dari tahun 2017 hingga 2021 memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan. Kenaikan UMR secara langsung dapat mempengaruhi pendapatan pekerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Peningkatan pendapatan pekerja namun dengan kondisi inflasi yang tinggi tidak akan mempengaruhi banyak kesejahteraan mereka. Maka salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah inflasi. Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat berkurang akibat harga komoditas yang semakin meningkat. Sehingga, para produsen melakukan efisiensi terhadap industrinya, seperti merasionalkan tenaga kerja dan restrukturisasi atau perampingan organisasi. Dengan demikian perusahaan akan mengurangi permintaan kerja sehingga menyebabkan kesempatan untuk penyerapan tenaga kerja berkurang dan berpengaruh pada pengangguran dan kemiskinan yang akan semakin meningkat. (Syariah et al., 2019).

Fluktuasi tingkat inflasi di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2017, tingkat inflasi mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai 4,48%. Kenaikan ini kemungkinan besar telah mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, di tahun 2018, terjadi penurunan tingkat inflasi menjadi 3,48%, yang dapat memberikan sedikit bantuan bagi masyarakat dalam mengatasi tekanan ekonomi yang mungkin mereka hadapi. Pada tahun 2019, tingkat inflasi di Kota Makassar kembali menurun menjadi 2,43%, memberikan harapan bahwa tekanan inflasi yang lebih rendah dapat membantu masyarakat untuk mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan daya beli mereka. Namun, di tahun 2021, tingkat inflasi kembali meningkat menjadi 4,27%, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap kenaikan harga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, dan upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2017) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan & Arka (2018) menunjukkan bahwa upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Igram (2017) menunjukkan bahwa kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini menggabungkan variabel dari penelitian sebelumnya, yaitu pengangguran, kesempatan kerja, upah minimum regional dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga memiliki kebaruan data dan lokasi penelitian yang berbeda, yaitu menggunakan data dari tahun 2008-2022 dan lokasi penelitiannya di kota Makassar

BAHAN DAN METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Pendekatan ini merupakan bagian dari penelitian kuantitatif, yang menghasilkan data berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar, serta publikasi yang relevan dengan topik penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini, data tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam konteks kemiskinan di Kota Makassar.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model Regresi Berganda. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-parameter estimasi dan mengevaluasi apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat serta menentukan pengaruhnya. Dalam konteks penelitian ini, metode regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas Diantaranya; tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan upah minimum kota, dan inflasi. Sementara variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan di Kota Makassar selama period 2008-2022. Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini, kita dapat menggunakan persamaan fungsi regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Persamaan regresi berganda umumnya memiliki bentuk:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \dots\dots\dots 1$$

Secara eksplisit dapat dinyatakan dalam fungsi *Cobb-Douglas* berikut:

$$Y = \beta_0 X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} X_4^{\beta_4} \mu \dots\dots\dots 2$$

Untuk memperoleh estimasi koefisien regresi, persamaan ini kemudian ditransformasi menjadi bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari variabel bebas, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 \ln(X_2) + \beta_3 \ln(X_3) + \beta_4 X_4 + \mu \dots\dots\dots 3$$

Keterangan :

Y = kemiskinan (persen); X1 = Pengangguran (persen); X2 = Kesempatan Kerja (jiwa); X3 = Upah Minimum kota (Rupiah); X4 = Inflasi (persen); β_0 = Konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Arah Regresi; μ = Kesalahan acak.

Penggunaan metode analisis regresi linear berganda memerlukan asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi.

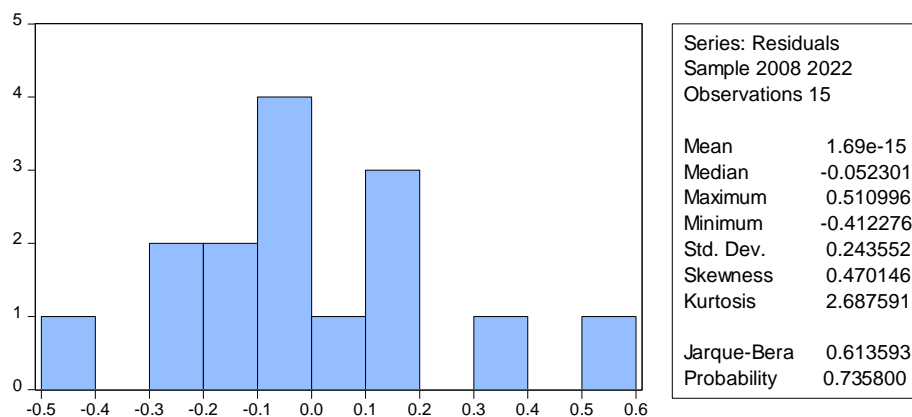
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu menggunakan asumsi klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi. Dalam uji asumsi klasik ini dapat dibagi beberapa tahap pengujian, diantaranya sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel regresi dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk melihat data ditribusi normal dan tidak, dapat dilakukan melalui *Jarque-Bera*. Normalitas suatu data dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas dari *Jarque-Bera* > 0.05 dan sebaliknya data tidak terdistribusi normal jika probabilitas *Jarque-Bera* < 0.05.



Gambar 1 Uji normalitas

Sumber: Hasil olah data eviews 10, 2023

Dari hasil pada Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.735 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen dalam satu model. Dimana kemiripan antara variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance* > 0.01 atau *VIF* < 10, maka dapat di artikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Jika nilai *Tolerance* < 0.01 atau *VIF* > 10, maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

Tabel 1. Uji multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	250.9614	45329.98	NA
X1	0.001826	45.67381	1.065391
X2	1.715534	54228.19	1.875189
X3	0.070509	2638.524	3.022418
X4	0.001722	10.03117	2.329816

Sumber: Hasil olah data eviews 10, 2023

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa keempat variabel independen memiliki hasil olah data meliputi:

1. Tingkat pengangguran (X_1) mempunyai nilai VIF sebesar $1.065 < 10.00$, sehingga dapat diartikan variabel ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.
2. Kesempatan kerja (X_2) mempunyai nilai VIF sebesar $1.875 < 10.00$, sehingga dapat diartikan variabel ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.
3. Upah Minimum Regional (X_3) mempunyai nilai VIF sebesar $3.022 < 10.00$, sehingga dapat diartikan variabel ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.
4. Inflasi (X_4) mempunyai nilai VIF sebesar $2.329 < 10.00$, sehingga dapat diartikan variabel ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Autokorelas

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Dan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji *Breusch-Godfrey*. Berikut ini adalah pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi: Jika nilai *probability Chi-Square* < 0.05 maka terdapat gejala autokorelasi. Jika nilai *probability Chi-Square* > 0.05 maka terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 2. Uji Autokorelasi

F-statistic	0.154720	Prob. F(2,7)	0.8595
Obs*R-squared	0.592679	Prob. Chi-Square(2)	0.7435

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji autokorelasi dengan *Breusch-Godfrey* menunjukkan bahwa nilai *probability Chi-Square* sebesar $0.7435 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan.

d. Uji Heterskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang terhindar dari heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidak heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu diuji menggunakan Uji Glejser. Pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah jika nilai *probability Chi-Square* > 0.05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai *probability Chi-Square* < 0.05 artinya terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3. Uji heteroskedastisitas

F-statistic	3.375889	Prob. F(4,10)	0.0540
Obs*R-squared	8.617987	Prob. Chi-Square(4)	0.0714
Scaled explained SS	4.892267	Prob. Chi-Square(4)	0.2985

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023

Berdasarkan Tabel 3 di atas hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser menunjukkan bahwa nilai *probability Chi-Square* sebesar 0.0714 > dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (independen) yaitu pengangguran, kesempatan kerja, upah minimum kota, dan Inflasi terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kemiskinan di kota Makassar 2008-2022.

Tabel 4. Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.032539	15.84176	0.570173	0.5811
X1	0.044289	0.042736	1.036351	0.3244
X2	0.809153	1.309784	0.617776	0.5505
X3	-1.057521	0.265535	-3.982597	0.0026
X4	-0.042770	0.041502	-1.030546	0.3270

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh bentuk persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 10.614 + 0.034X_1 + 0.084X_2 - 0.770X_3 - 0.006X_4 + e \quad (4)$$

Melalui hasil regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel pengangguran (X_1) memiliki nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ yaitu $1.036 < 1.761$ dan tingkat signifikansi sebesar 0.324 dalam artian nilainya lebih besar dari α (0.05). Sehingga diperoleh nilai $0.324 > 0.05$ yang berarti pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di

Kota Makassar. Nilai koefisien (β_1) sebesar 0.044 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara pengangguran terhadap kemiskinan. Artinya, apabila terjadi peningkatan 1% pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.044 dengan asumsi, kesempatan kerja (X2), UMK (X3), dan inflasi (X4), dianggap konstan.

Variabel kesempatan kerja (X₂) memiliki nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ yaitu $0.617 < 1.761$ dan tingkat signifikansi sebesar 0.55 dalam artian nilainya lebih besar dari α (0.05). Sehingga diperoleh nilai $0.55 > 0.05$ yang berarti kesempatan kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar.

Variabel upah minimum kota (X₃) memiliki nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $-3.982 > 1.761$ dan tingkat signifikansi sebesar 0.002 dalam artian nilainya lebih kecil dari α (0.05). Sehingga diperoleh nilai $0.002 < 0.05$ yang berarti tingkat upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Nilai koefisien (β_3) sebesar -1.057 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara Upah minimum regional terhadap kemiskinan. Artinya, apabila terjadi peningkatan 1% upah minimum regional maka akan menurunkan kemiskinan sebesar -1.057 dengan asumsi, pengangguran (X1), kesempatan kerja (X2), dan inflasi (X4), dianggap konstan.

Variabel Inflasi (X₄) memiliki nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ yaitu $-1.030 < 1.761$ dan tingkat signifikansi sebesar 0.327 dalam artian nilainya lebih besar dari α (0.05). Sehingga diperoleh nilai $0.327 > 0.05$ yang berarti inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar.

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R_2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Untuk menghindari bias dari model yang digunakan maka dalam penelitian ini koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai *adjusted R.Squared*. Nilai berkisar antara 0 dan 1 semakin besar nilai *adjusted R₂*, maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen.

Tabel 5. Uji koefisien determinasi

R-squared	0.737479	Mean dependent var	4.826000
Adjusted R-squared	0.632471	S.D. dependent var	0.475346
S.E. of regression	0.288175	Akaike info criterion	0.610704
Sum squared resid	0.830449	Schwarz criterion	0.846721
Log likelihood	0.419718	Hannan-Quinn criter.	0.608190
F-statistic	7.023046	Durbin-Watson stat	1.692062
Prob(F-statistic)	0.005845		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (R_2) yang ditentukan dengan *Adjusted R-square* sebesar 0.632 dengan nilai

dengan sebesar 63.2% dari nilai ini menunjukkan bahwa hubungan variabel independen pengangguran (X_1), kesempatan kerja (X_2), upah minimum regional (X_3), inflasi (X_4) dengan variabel dependen kemiskinan (Y) sebesar 63.2%. Sedangkan sisanya ($100\% - 63.2\% = 36.8\%$) dipengaruhi oleh variabel luar.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan di peroleh hasil bahwa pengambilan keputusan uji hipotesis parsial t maka H_a ditolak atau hipotesis pertama tidak diterima yang artinya pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di kota Makassar maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah pengangguran di Kota Makassar tidak menjadi tolak ukur akan meningkatnya jumlah kemiskinan di Kota Makassar. Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa pengangguran sebagai salah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan

Sesuai dengan teori Lingkaran Setan yang dikemukakan oleh Myrdal (1968) bahwa tidak memiliki pekerjaan atau menganggur dapat menyebabkan orang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Ketika seseorang tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, mereka mungkin kesulitan untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk meningkatkan peluang kerja di masa depan. Bahkan bisa menyebabkan adanya pertahanan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah mengapa terbebas dari pengangguran dapat menyebabkan terbebas pula dari kemiskinan..

Menurut Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karisma & Soejoto, 2010) dimana hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, dan sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ikram, 2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya lapangan kerja merupakan alasan utama terjadinya kemiskinan. Mengingat kekuatan kuat yang berperan dalam ekonomi global, masalah-masalah ini menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat luas, oleh karena itu direkomendasikan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan menghentikan pengangguran.

Pemerintah juga harus berusaha meyakinkan masyarakatnya untuk mengontrol angka kelahiran.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan temuan dalam penelitian (Fadillah & Sabar, 2023; Ningtias & Anwar, 2021) bahwa Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Begitupula dengan temuan dalam penelitian (Karisma & Soejoto, 2010), bahwa di Kabupaten Pinrang terdapat pengaruh yang negatif dari tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinannya. Artinya, meskipun pengangguran menurun, tetap membuat angka kemiskinan di Kabupaten Pinrang meningkat.

Maka dari itu apabila pengangguran di Kota Makassar mengalami peningkatan tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap peningkatan kemiskinan yang ada di Kota Makassar, hal ini disebabkan karena pengangguran di Kota Makassar masih didominasi oleh pengangguran yang terdidik dan masih merintis usaha yang menyebabkan mereka masih dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri ataupun mereka masih memiliki keluarga yang dapat menghidupi mereka.

Pengaruh Kesempatan kerja terhadap kemiskinan di Kota Makassar

Berdasarkan pengambilan keputusan uji hipotesis parsial t maka H_0 ditolak atau hipotesis kedua tidak di terima yang artinya kesempatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. sehingga di simpulkan bahwa semakin rendah tingkat kesempatan kerja dikota Makassar maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

Ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi antara lain: kualitas pekerjaan, kesenjangan pendapatan, ketidaksesuaian keterampilan, diskriminasi dan akses terbatas, lingkungan bisnis dan kebijakan, perubahan structural dan faktor geografis. Hasil tersebut seringkali mencerminkan kompleksitas dinamika pasar tenaga kerja dan tantangan structural yang mungkin membatasi dampaknya pada masyarakat miskin.

Salah satu teori yang dapat dihubungkan dengan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan adalah "*Human Capital Theory*" atau Teori Modal Manusia. Teori ini berfokus pada pentingnya investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan individu sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka di pasar tenaga kerja. Peningkatan partisipasi kesempatan kerja dalam pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengangkat individu keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan kualifikasi mereka dan memberikan peluang kerja yang lebih baik. Namun, meskipun teori ini memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang, perubahan di pasar tenaga kerja mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk benar-benar mempengaruhi tingkat kemiskinan secara signifikan. Penting untuk diingat bahwa teori ini tidak mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kemiskinan, seperti kebijakan sosial,

kesetaraan akses, dan peluang ekonomi yang lebih luas kombinasi dari berbagai faktor ini biasanya memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Arka, 2016), dimana dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa semakin rendah tingkat kesempatan kerja, maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat suatu daerah. Hasil tersebut mengindikasikan kepada pemerintah agar menyediakan peluang kesempatan kerja, karena semakin banyak peluang kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat, maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Apabila kesempatan kerja luas dan semakin banyak menyerap tenaga kerja, maka masyarakat miskin akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan yang akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Junaidi, 2017) dimana dari hasil penelitian yang dilakukan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal ini terbukti dari hasil uji t sebesar 4.385 dengan nilai signifikansi 0,00. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja belum efektif mengurangi kemiskinan, artinya setiap penambahan kesempatan kerja belum tentu mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap kemiskinan di Kota Makassar

Berdasarkan pengambilan keputusan uji hipotesis parsial t maka H_a di terima atau hipotesis ketiga di terima yang artinya tingkat tingkat upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. sehingga di simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat Upah Minimum Regional di kota Makassar maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan pada upah minimum tidak selalu diiringi oleh penurunan angka kemiskinan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fenomena yang memperlihatkan bahwa peningkatan pada upah minimum cenderung diikuti oleh terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK pada gilirannya akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini tentunya akan meningkatkan angka kemiskinan.

Teori neoklasi mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi tenaga kerja, pengangguran bertambah yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan. Upah minimum menyebabkan non pasar berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja sehingga meningkatkan harga tenaga kerja, dengan meningkatnya harga tenaga kerja upah minimum mengakibatkan pengurangan permintaan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aryantari, 2017) dimana hasil yang diperoleh bahwa tingkat upah minimum

regional dengan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2020 memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal ini disebabkan rata-rata upah minimum regional sebagian provinsi di Indonesia masih dalam kondisi stabil serta upah minimum regional tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kemiskinan karena terdapat banyak faktor lain yang benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Pengaruh tingkat Inflasi terhadap kemiskinan di Kota Makassar

Berdasarkan pengambilan keputusan uji hipotesis parsial t maka H_0 ditolak atau hipotesis keempat tidak di terima yang artinya tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Sehingga disimpulkan bahwa meningkatnya tingkat inflasi maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di kota Makassar.

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan pendapatan antar golongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar dari jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menyebabkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka panjang tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak terhadap kemiskinan. Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih tinggi dari barang impor. Masyarakat lebih tertarik membeli barang impor di bandingkan barang domestik. Harga barang yang mahal menyebabkan turunya daya saing barang domestik menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik yang menyebabkan kurangnya permintaan akan barang dalam negeri. Sejumlah perusahaan akan mengurangi produksi. Produksi berkurang berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya yang nantinya akan berdampak terhadap kemiskinan.

Menurut Sadono Sukirno, inflasi yang tinggi akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan yang produktif sangat tidak menguntungkan. Kenaikan harga-harga juga menimbulkan efek buruk bagi perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang Negara tidak dapat bersaing di pasaran internasional menyebabkan ekspor menurun. Sebaliknya, harga-harga produk di dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat dari inflasi menyebabkan barang-barang impor relatif murah, maka lebih banyak impor yang dilakukan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan neraca perdagangan. Selain menimbulkan efek buruk atas kegiatan ekonomi Negara, inflasi juga menimbulkan efek buruk terhadap individu dan masyarakat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ikram, 2018), dimana hasil yang diperoleh bahwa variabel inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya ketika terjadi inflasi maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi karena tingkat inflasi di

Kota Makassar tergolong inflasi ringan yang berpengaruh positif terhadap perekonomian

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar; kesempatan kerja yang bekerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar; upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar; inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Diharapkan fokus pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah mengedepankan program terpadu secara serius dan berkelanjutan. Karena dimensi kemiskinan memiliki cakupan luas dan bersifat multi-dimensi. Beberapa variabel dalam penelitian ini hanya bagian kecil dari faktor penyebab dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Alimuddin, C. (2018). Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
- (2) Aryantari, I. (2017). *Pemodelan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline*.
- (3) Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analysis of Economic Growth and Poverty on Inequality in Aceh Province. *J. Researcher. Econ. Account*, 1(2).
- (4) Ayu, D. S. (2018). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran terbuka, IPM, jumlah penduduk dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (tahun 2010-2015).
- (5) Fadillah, N., & Sabar, W. (2023). Efek Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Gowa. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 3(1), 25-37.
- (6) Fitri, F., & Junaidi, J. (2017). Pengaruh pendidikan, upah dan kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 5(1), 26-32. <https://doi.org/10.22437/jels.v5i1.3926>
- (7) Iksan, M., & Arka, S. (2017). Pengaruh upah, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja serta kemiskinan provinsi jabar bagian selatan. *E-Jurnal Ep Unud*, 11(1), 147-175.
- (8) Ikram, M. (2018). *Pengaruh Tingkat Upah, Inflasi Dan Pertumbuhan, Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Makassar*. 1-

118.

- (9) Karisma, A., & Soejoto, A. (2010). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1-15.
- (10) Krisnawati, S. (2019). *Pengaruh Pendidikan Dan Upah Minimum*.
- (11) Ningtias, E. N. A., & Anwar, A. F. (2021). Menukur dampak pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(1).
- (12) Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *EP Unud*, 7(3), 416-444.
- (13) Sabar, W., Iwang, B., & Maisar, M. (2022). Revealing poverty in South Sulawesi with several interrelated development indicators. *SOROT*, 17(3), 129-137. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.3.129-137>
- (14) Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*.
- (15) Suwandi, S., & Sabar, W. (2022). *Do Economic Growth , Income Distribution , and Investment Reduce Poverty Level? 2*(September 2018), 87-96. <https://doi.org/10.24252/best.v2i2.31479>
- (16) van/indrawiguna. (2013). Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Online Universitas Jambi*.